

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada tanggal 18 November 1912 (8 Dzulhijah 1330 H) tepatnya di Kampung Kauman Yogyakarta terbentuk suatu organisasi Islam yang terinspirasi dari tokoh Muhammad Darwis atau lebih dikenal dengan K.H. Ahmad Dahlan. Organisasi tersebut dinamai Organisasi Muhammadiyah. Pada perkembangannya Organisasi Muhammadiyah tersebar di seluruh Indonesia termasuk di Provinsi Lampung yang Penulis dalam Penelitian ini membahas posisi dan peran Muhammadiyah sebagai organisasi masyarakat sipil di Kota Bandar Lampung. Muhammadiyah Kota Bandar Lampung mempunyai visi dan misi yang sama dengan Muhammadiyah yang berada di wilayah Indonesia lainnya, yaitu misi gerakan sosial untuk membantu masyarakat.

Muhammadiyah Kota Bandar Lampung yang telah berdiri sejak tahun 1970, saat ini telah memiliki kepengurusan tingkat cabang (kecamatan) hingga tingkat ranting (kelurahan) di seluruh kelurahan Kota Bandar Lampung. Diharapkan dengan tersebarnya kepengurusan Muhammadiyah di semua tingkat kelurahan di Bandar Lampung, akan sangat efektif di dalam membantu Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam mengatasi masalah-masalah sosial di Kota Bandar Lampung.

K.H. Ahmad Dahlan mendirikan organisasi Muhammadiyah untuk melakukan cita-cita dalam pembaharuan Islam di Indonesia. K.H. Ahmad Dahlan ingin mengadakan suatu pembaharuan dalam cara berpikir dan beramal menurut tuntunan agama Islam. Ia ingin mengajak umat Islam di Indonesia untuk kembali hidup menurut tuntunan Al-Qur'an dan Al-Hadits. Sejak pertama didirikan, telah ditegaskan bahwa Muhammadiyah bukan organisasi yang bergerak dibidang politik, namun bersifat sosial dan bergerak di bidang pendidikan. Hasil pemikiran K.H. Ahmad Dahlan yang dilakukan secara mendalam dan sungguh-sungguh tersebut, kemudian melahirkan berbagai gerakan pembaharuan yang merupakan operasionalisasi dan pelaksanaan dari hasil pemahaman dan pemikirannya terhadap ajaran Islam.

Di Indonesia lahir beberapa organisasi atau gerakan Islam, diantaranya adalah Muhammadiyah yang lebih dari 30 tahun sebelum merdeka dan organisasi lainnya yang bergerak di bidang politik, sosial, dan pendidikan. Muhammadiyah adalah organisasi yang berdiri bersamaan dengan kebangkitan masyarakat Islam Indonesia pada dekade pertama yang sampai hari ini bertahan dan membesar yang sulit dicari persepadanannya. dilihat dari amal usaha dan gerakannya di bidang sosial kemasyarakatan, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan, Muhammadiyah adalah sebuah organisasi Islam yang besar di Indonesia. Nama organisasi ini diambil dari nama Nabi Muhammad SAW, sehingga Muhammadiyah juga dapat dikenal sebagai orang-orang yang menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW.

Tujuan utama Muhammadiyah adalah mengembalikan seluruh penyimpangan yang terjadi dalam proses dakwah. Penyimpangan ini sering menyebabkan ajaran Islam bercampur-baur dengan kebiasaan di daerah tertentu dengan alasan adaptasi.

Gerakan Muhammadiyah berciri semangat membangun tata sosial dan pendidikan masyarakat yang lebih maju dan terdidik. menampilkan ajaran Islam bukan sekadar agama yang bersifat pribadi dan statis, tetapi dinamis dan berkedudukan sebagai sistem kehidupan manusia dalam segala aspeknya. Akan tetapi, ia juga menampilkan kecenderungan untuk melakukan perbuatan yang nyata (*riil*).

Sebagai dampak positif dari organisasi ini, kini telah banyak berdiri rumah sakit, panti asuhan, dan tempat pendidikan di seluruh Indonesia. Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi Islam terbesar yang berumur lebih tua dari bangsa ini sangat wajar jika ikut berpartisipasi dalam memecahkan permasalahan bangsa. Dalam arti memberikan kontribusi *riil* terhadap masa depan bangsa. Sebagai organisasi dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, Muhammadiyah tidak bisa tinggal diam dalam setiap aspek kehidupan. Sebagai konsekuensinya muhammadiyah dalam gerakannya harus senantiasa berdimensi dakwah baik dalam bidang ekonomi, pendidikan maupun sosial dan budaya. Melihat kondisi kehidupan sosial kemasyarakatan yang sudah carut marut dan jauh dari nuansa religius, Muhammadiyah merasa bertanggung jawab untuk ikut menyelesaikan masalah sosial tersebut dan berupaya sebaik mungkin dalam

mewujudkan terciptanya masyarakat utama yang cerdas, berpendidikan, berkualitas, mandiri tertib hukum, tolong menolong dan diridhoi Allah SWT.

Pada perjalanannya Muhammadiyah telah memberikan banyak sumbangsinya terhadap upaya terciptanya masyarakat sipil di Indonesia. Tidak sedikit program dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Muhammadiyah yang mengarah pada terciptanya *civil society* di Indonesia, baik itu di tingkatan nasional maupun lokal. Beberapa kiprah Muhammadiyah dalam perpolitikan nasional diantaranya, pertama, menjelang Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Agustus 2000, Muhammadiyah menolak dimasukkannya tujuh kata Piagam Jakarta ke dalam Amandemen Undang-Undang Dasar 1945.

Muhammadiyah menyadari bahwa dengan dimasukkannya tujuh kata Piagam Jakarta ke dalam Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 akan membangkitkan kembali prasangka-prasangka lama dari kalangan luar Islam mengenai “Negara Islam” di Indonesia. Prasangka seperti itu juga mengandung bahaya terhadap integrasi bangsa yang saat ini mengalami ancaman dari berbagai sudut. Kedua, Muhammadiyah mempunyai peran dan kontribusi yang besar dalam penyusunan dan pengesahan Rancangan Undang Undang Sistem pendidikan nasional. Sejak proses sosialisasi dan perumusan awal di Panitia Kerja Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Pimpinan Pusat Muhammadiyah bersama Majelis Ulama Indonesia dan ormas-ormas Islam lainnya berperan aktif sampai pengesahan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menjadi Undang-Undang Sistem pendidikan nasional

pada tanggal 10-11 Juni 2003 yang penuh dinamika dan kontroversial. Ketiga, Muhammadiyah-Nahdatul Ulama bekerjasama dengan Kemitraan bagi pembaharuan Tata Pemerintahan mendeklarasikan berdirinya “Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi”, pada hari Senin, 17 September 2003 di Pondok Pesantren Al Hikam, Malang Jawa Timur. Salah satu point terpenting dalam deklarasi tersebut adalah bahwa Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama akan berjuang dan berjihad dengan sungguh-sungguh untuk melawan praktik korupsi di segala bidang serta menginstruksikan kepada seluruh pengurus disemua tingkatan untuk terlibat secara aktif dalam mensosialisaikan gerakan tersebut. Keempat, bersama Nahdatul Ulama dan Dewan Dakwah Indonesia, Muhammadiyah menolak Rancangan Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Muhammadiyah menilai bahwa keberadaan Rancangan Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang diusulkan pemerintah kurang efektif untuk direalisasikan. Keberadaannya tidak akan bisa memberikan jaminan terwujudnya rekonsiliasi. Bahkan dikhawatirkan akan menjadi sumber konflik baru yang dapat mengganggu stabilitas politik dan ekonomi.

Selain kebijakan yang mencakup sektor nasional di atas, kebijakan-kebijakan program kerja Muhammadiyah juga diarahkan pada terciptanya masyarakat sipil di Indonesia, diantaranya program kerja dibidang pengkaderan dan sumber daya manusia, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan dan pengembangan masyarakat, supremasi hukum dan bidang lingkungan hidup yang kesemuanya diarahkan pada terciptanya masyarakat madani di Indonesia.

Kita ketahui dewasa ini banyak organisasi-organisasi Islam yang berkembang di Indonesia selain Muhammadiyah, pada dasarnya organisasi-organisasi yang berkembang di Indonesia bertujuan untuk menegakkan aturan agama Islam sebagaimana mestinya, tetapi pada perjalanannya pola pikir dan ilmu pengetahuan yang terbatas sehingga menimbulkan perbedaan penafsiran, sebagai contoh ada para pengikut organisasi Islam yang masih menjalankan ajaran agama Islam, tetapi masih menjalankan kebudayaan nenek moyang yang sebenarnya bertentangan dengan ajaran agama Islam, di sisi lain ada juga pengikut organisasi Islam yang lebih condong ke arah radikal.

Sementara itu karakteristik gerakan sosial Muhammadiyah adalah gerakan sosial yang bertujuan untuk mengikuti sunah rasul secara murni tanpa di campuri hal-hal yang tidak ada ajarannya dalam peraturan agama Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Al-hadis, juga mengutamakan kedamaian dalam dakwah tanpa menimbulkan konflik secara langsung. Oleh karena penafsiran yang berbeda tersebut, Penulis tertarik untuk membahas posisi dan peran Muhammadiyah sebagai organisasi masyarakat sipil di Kota Bandar Lampung yang mempunyai kontribusi yang cukup signifikan untuk membangun kesejahteraan umat melalui gerakan sosial yang dilakukan.

Dipilihnya Muhammadiyah Kota Bandar Lampung sebagai fokus penelitian berdasarkan hasil pengamatan penulis Organisasi Muhammadiyah memiliki sumbangsih terhadap pembangunan Kota Bandar Lampung melalui gerakan sosial yang dilakukan kaitannya dengan masyarakat sipil di Kota Bandar Lampung sehingga penulis tertarik untuk membahasnya lebih lanjut.

B. Rumusan Masalah

Bagaimanakah posisi dan peran Muhammadiyah sebagai organisasi masyarakat sipil di Kota Bandar Lampung?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui posisi dan peran masyarakat sipil di Bandar Lampung (Studi Pada Pengurus Daerah Muhammadiyah Kota Bandar Lampung).

D. Kegunaan penelitian

1. Aspek teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya dan memberikan kontribusi wacana serta pemikiran bagi perkembangan Ilmu Pemerintahan, khususnya tentang posisi dan peran Muhammadiyah sebagai organisasi masyarakat sipil di Kota Bandar Lampung yang diaktualisasikan melalui gerakan sosial untuk memberdayakan umat. Selain itu diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna sebagai referensi tambahan bagi semua pihak yang tertarik melakukan penelitian dengan kajian gerakan sosial di masa yang akan datang.
2. Aspek praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi aktivis Muhammadiyah dalam mengaktualisasikan posisi dan perannya dalam usahanya mewujudkan penguatan masyarakat sipil di Kota Bandar Lampung.